

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada laporan tahunan perusahaan masih jarang dilakukan. Kebanyakan peneliti banyak meneliti mengenai pengakuan, penerapan dan pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di bawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini beserta perbedaan dan persamaanya.

##### **2.1.1 Chandra Kurniawan dan Indrawati Yuhertiana (2009)**

Penelitian ini mengambil topik penerapan dan pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti tentang penerapan dan pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk yang merupakan perusahaan non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kemauan sendiri untuk melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan melaporkannya sebagai transparasinya terhadap investor dan masyarakat. Hal ini sangat berbeda dengan konsep pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) disebabkan adanya unsur *mandatory* berupa kebijakan pemerintah. Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT. Semen Gresik Tbk (Chandra & Indrawati, 2009).

Hasil pada penelitian ini adalah menunjukkan bahwa PT. Semen Gresik dalam menerapkan CSR mengacu pada PER-05/MBU/2007 dan SE-04/MBU.S/2007. Motif yang dilakukan kendati secara normatif berasal dari kesadaran tapi tidak lepas dari kebutuhan akan eksistensi dan *corporate image*. Tahapan evaluasi belum bisa mengkomodir secara data perkembangan mitra binaan dikarenakan keterbatasan SDM. Pelaporan yang dilakukan sangat penting karena menyangkut prinsip transparansi dan yang penyusun pelaporan adalah Seksi administrasi dan keuangan PKBL yang juga terdapat permasalahan berupa belum ada pembagian fungsi. Secara bentuk pelaporan mengacu pada peraturan menteri BUMN dan juga dilakukan modifikasi (Chandra & Indrawati, 2009).

Persamaan penelitian adalah meneliti pengungkapan mengenai pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. Pada penelitian ini meneliti tentang penerapan dan pelaporannya saja, sedangkan peneliti akan meneliti tentang perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada laporan tahunan perusahaan.
- b. Penelitian ini menggunakan PT. Semen Gresik Tbk sebagai subjek penelitian sedangkan peneliti menggunakan PT. PLN (Persero) di Surabaya.

### **2.1.2 Anis Chariri dan Firman Aji Nugroho (2009)**

Penelitian ini mengambil topik retorika dalam pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) : Analisis Semiotik atas *Sustainability Reporting* PT. Aneka Tambang Tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana cara PT.

Aneka Tambang melaporkan CSR dalam *sustainability report* dan dalam mengungkapkan informasi pelaksanaan CSR dan *sustainability* perusahaan.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah PT. Aneka Tambang menggunakan format pelaporan GRI sebagai pedoman dalam melakukan *sustainability reporting*. PT. Aneka Tambang mengungkapkan informasi CSR dalam bentuk cerita retorik untuk membentuk image positif bahwa PT. Aneka Tambang menjalankan kegiatan bisnisnya dengan tetap menaruh perhatian pada isu sosial dan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan *stakeholders* sebagai audien sekaligus untuk memperoleh legitimasi dari *stakeholdersnya* (Anis & Firman, 2009).

Persamaan penelitian ini adalah mengungkap mengenai pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada laporan tahunan perusahaan. Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. Pada penelitian ini meneliti mengenai pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Sustainability Reporting dan bagaimanakah penerapannya. Sedangkan peneliti mengungkap tentang perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada laporan tahunan perusahaan.
- b. Penelitian ini menggunakan PT. Aneka Tambang sebagai subjek penelitian sedangkan peneliti menggunakan PT. PLN (Persero) di Surabaya.

### **2.1.3 Ati Harmoni dan Ade Andriyani (2008)**

Penelitian ini mengambil topik pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada *Official Website* perusahaan (Studi pada PT. Unilever Indonesia Tbk). Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah perusahaan telah

memanfaatkan *official website*-nya untuk mengungkapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa Unilever telah mencoba memanfaatkan laman resminya untuk mengungkapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukannya, baik dari sisi tata kelola perusahaan, kebijakan lingkungan dan kebijakan sosial (Ati & Ade, 2008).

Persamaan penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan. Perbedaannya adalah :

- a. Pada penelitian ini hanya membahas mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan melalui *official website*. Sedangkan peneliti mengungkap tidak hanya pengakuannya saja melainkan perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada laporan tahunan perusahaan.
- b. Penelitian ini menggunakan PT. Unilever Indonesia Tbk sebagai subjek penelitian sedangkan peneliti menggunakan PT. PLN (Persero) di Surabaya.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)**

Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) sangatlah banyak, berikut ini beberapa definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut beberapa sumber, diantaranya :

1. Menurut UU no. 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, 2007).
2. Selain itu, ISO 26000 mengenai *Guidance on Social Responsibility* juga memberikan definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR). Meskipun pedoman *Corporate Social Responsibility* (CSR) standart internasional ini baru akan ditetapkan tahun 2010, *draft* pedoman ini bisa dijadikan rujukan. Menurut ISO 26000, *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh (ISO 26000).

3. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen dan upaya perusahaan yang beroperasi secara legal dan etis, untuk meminimalkan risiko kehadiran perusahaan, berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup pemangku kepentingan (ICA, 2011).
4. Secara lengkap, definisi tanggung jawab sosial adalah: *“Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.”* yang artinya adalah tanggung jawab sebuah organisasi atas dampak dari keputusan dan kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku transparan dan etis yang memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, harapan *stakeholder*, taat pada hukum yang berlaku, dan konsisten pada norma-norma perilaku internasional yang terintegrasi di seluruh organisasi serta dipraktekkan dalam hubungannya (CSR, 2006).
5. Menurut *The World Business Council For Sustainable Development (WBCSD)*, definisi *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah *“corporate social responsibility is the continuing commitment by business to be have ethically and contribute to economic development while improving the quality*

*of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”* yang artinya komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya (The World Business Council For Sustainable Development (WBCSD)).

6. Menurut buku yang diterbitkan oleh Andreas Lako, *Corporate Social Responsibility (CSR)* bermakna bahwa suatu perusahaan harus bertanggung jawab atas setiap tindakannya yang berdampak pada masyarakat, komunitas mereka dan lingkungan (Andreas, 2010, p. 25).
7. Menurut buku yang ditulis oleh Nor Hadi, *Tanggungjawab sosial (Social Responsibility)* merupakan pelebaran tanggungjawab perusahaan sampai lingkungan baik secara fisik maupun psikis. Hal itu dapat dilakukan dengan investasi pada sektor-sektor ramah lingkungan, menjaga keseimbangan eksploitasi, pengolahan limbah (daur ulang limbah), menaikkan pengeluaran-pengeluaran sosial (biaya sosial) serta cara lain guna menjaga keseimbangan lingkungan dan sejenisnya. Biaya-biaya tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan perusahaan dengan harapan masyarakat dan lingkungan (Nor, 2010, p. vi).
8. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan (Edi, 2008).

9. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *strategic stakeholders*-nya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. *Corporate Social Responsibility (CSR)* memandang perusahaan sebagai agen moral. Menggunakan atau tidak menggunakan aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya (Mas, 2006).

### **2.2.2 Pentingnya Corporate Social Responsibility (CSR)**

Beberapa teori berikut ini menjelaskan mengenai pentingnya *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk dilaksanakan dalam suatu organisasi atau perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut (Lako, 2010, pp. 5-6) :

#### **a. Teori Stakeholder**

Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Jika mampu, perusahaan bakal meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta laba. Prespektif teori *stakeholder*

menyatakan bahwa masyarakat dan lingkungan merupakan *stakeholder* inti perusahaan yang harus diperhatikan.

**b. Teori Legitimasi**

Perspektif teori legitimasi mengemukakan bahwa perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terkait dalam suatu "*social contract*".

**c. Teori Kontrak Sosial**

Menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat di mana masyarakat memberi *costs* dan *benefits* untuk keberlanjutan suatu korporasi. Oleh karena itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat suka rela.

**d. Teori Sustainability Korporasi**

Menurut teori ini, agar bisa hidup dan tumbuh secara berkelanjutan, korporasi harus mengintegrasikan tujuan bisnis dengan tujuan sosial dan ekologi secara utuh. Pembangunan bisnis harus berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan secara terpadu, serta tidak mengorbankan kepentingan generasi-generasi berikutnya untuk hidup dan memenuhi kebutuhannya. Perspektif teori ini menyatakan bahwa masyarakat dan lingkungan

adalah pilar dasar dan utama yang menentukan keberhasilan bisnis suatu perusahaan sehingga harus selalu diproteksi dan diberdayakan.

**e. Teori *Political Economy***

Menurut teori ini, domain ekonomi tidak dapat diisolasi dari lingkungan di mana transaksi-transaksi ekonomi dilakukan. Laporan keuangan (ekonomi) perusahaan merupakan dokumen sosial dan politik serta juga dokumen ekonomi karena tidak dapat diisolasi dari masyarakat dan lingkungan, perusahaan wajib memperhatikan dan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

**f. Teori Keadilan**

Menurut teori ini, dalam sistem kapitalisasi pasar bebas laba/rugi sangat tergantung pada *the unequal rewards and privileges* yang terdapat dalam laba dan kompensasi. Laba/rugi mencerminkan ketidakadilan antar pihak yang dinikmati atau diderita suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus adil terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang sudah turut menanggung dampak eksternalitas perusahaan melalui program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

### **2.2.3 Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR)**

Kemauan baik perusahaan untuk melaksanakan atau menjalankan beberapa program atau kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan menyisihkan dana secara berkelanjutan, sebenarnya juga akan mendatangkan

sejumlah manfaat bagi perusahaan itu sendiri, diantaranya adalah (Andreas, 2010, p. 90) :

- a. Sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang.
- b. Memperkokoh profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan.
- c. Meningkatnya akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor, kreditor, pemasok, dan konsumen.
- d. Meningkatnya komitmen, etos kerja, efisiensi dan produktivitas karyawan.
- e. Menurunnya kerentanan gejala sosial dan resistensi dari komunitas sekitarnya karena diperhatikan dan dihargai perusahaan.
- f. Meningkatnya reputasi, *goodwill*, dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

#### **2.2.4 Teori Perlakuan Akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

##### **a. Andreas Lako (2010)**

Biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang memiliki manfaat ekonomik yang cukup di masa datang, perlakuan akuntansinya adalah sebagai pengeluaran investasi (aset) dan harus diamortisasi selama taksiran umur manfaat ekonomisnya. Biaya-biaya tersebut dilaporkan di neraca dalam kelompok investasi *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan untuk biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tidak atau kurang memiliki potensi manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa depan, perlakuan akuntansinya adalah sebagai pengeluaran beban atau kerugian dan dilaporkan dalam laporan laba-rugi pada kelompok biaya operasional atau biaya kontinjen.

**b. Nor Hadi (2010)**

Dilihat dari kemanfaatan biaya sosial terdapat kemanfaatan jangka pendek dan jangka panjang serta terdapat pengakuan yang memiliki potensi ekonomi di masa depan, maka biaya tanggungjawab dikategorikan *current expenditure* dan *capital expenditure*. Menurut ISAK 3 menyatakan bahwa apabila biaya tanggungjawab sosial tidak bisa dikaitkan dengan perolehan suatu aktiva, maka biaya tersebut harus dibebankan pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual. Pengeluaran *current expenditure* termasuk pada jenis biaya ini. Perlakuan biaya sosial tidak dibebankan pada saat dibayar, melainkan pada saat terdapat kewajiban konstruktif atau legal pada Perseroan, yang muncul ketika pada saat keputusan RUPS atau Direksi menetapkan besarnya biaya sosial dan lingkungan. Pengeluaran jangka panjang (*capital expenditure*) dan pengeluarannya yang terkait dengan perolehan aktiva tetap baik berwujud maupun tidak berwujud, Perseroan wajib melakukan kapitalisasi dan mencatatnya sebagai beban harga perolehan aktiva tetap.

**2.2.5 Perlakuan Akuntansi****a. Beban**

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (KDPP-LK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban

yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Definisi beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas) persediaan dan aktiva tetap ((IAI), Kerangka Dasar Penyajian Penyusunan Laporan Keuangan, 2010).

Definisi beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasi, misalnya, kerugian yang timbul dari pengaruh peningkatan kurs valuta asing yang berhubungan dengan pinjaman perusahaan dalam mata uang asing tersebut. Kalau kerugian diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Kerugian seringkali dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penghasilan yang bersangkutan ((IAI), Kerangka Dasar Penyajian Penyusunan Laporan Keuangan, 2010).

Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aktiva tetap) ((IAI), Kerangka Dasar Penyajian Penyusunan Laporan Keuangan, 2010).

Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching of costs with revenues*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama; misalnya, berbagai komponen beban yang membentuk beban pokok penjualan (*cost or expense of goods sold*) diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Namun demikian, penerapan konsep *matching* dalam kerangka dasar ini tidak memperkenankan pengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aktiva atau kewajiban ((IAI), Kerangka Dasar Penyajian Penyusunan Laporan Keuangan, 2010).

Ketika manfaat ekonomi yang diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan maka hanya dapat ditentukan secara luas atau tak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva seperti aktiva tetap, *goodwill*, paten, merek dagang. Dalam kasus semacam itu, beban ini disebut penyusutan atau amortisasi. Prosedur alokasi ini dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aktiva yang bersangkutan ((IAI), Kerangka Dasar Penyajian Penyusunan Laporan Keuangan, 2010).

Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva ((IAI), Kerangka Dasar Penyajian Penyusunan Laporan Keuangan, 2010).

Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aktiva, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk ((IAI), Kerangka Dasar Penyajian Penyusunan Laporan Keuangan, 2010).

**b. Aset Tidak Berwujud**

Aktiva tidak berwujud (*in tangible asset*) adalah aktiva tak lancar (*noncurrent asset*) dan tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lain. Salah satu karakteristik aktiva tidak berwujud yang paling penting adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaatnya di kemudian hari. Dalam banyak kasus, nilai aktiva tak berwujud berkisar antara nihil sampai dengan jumlah yang besar. Aktiva tidak berwujud antara lain dapat berbentuk hak paten, hak cipta, *franchise*, merk dagang dan *goodwill* ((IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 19 Aktiva Tak Berwujud, 2010).

Klasifikasi aktiva tidak berwujud ((IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 19 Aktiva Tak Berwujud, 2010) :

1. Aktiva tidak berwujud dibedakan menurut sifat kekhususan, masa manfaat, metode amortisasi dan hubungannya dengan kegiatan usaha.
2. Berdasarkan eksistensinya, aktiva tidak berwujud dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori:
  - a. Aktiva tidak berwujud yang eksistensinya dibatasi oleh ketentuan perundangundangan, peraturan pemerintah, perjanjian yang dibuat antara para pihak atau sifat dari aktiva tersebut, misalnya hak paten, hak sewa, hak cipta, *franchise* yang terbatas, lisensi.
  - b. Aktiva tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas dan tidak dapat dipastikan masa berakhirnya, misalnya merk dagang, proses dan formula rahasia, *perpetual franchise*, *goodwill*.

Penilaian aktiva tidak berwujud tergantung pada tujuan pelaporan ((IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 19 Aktiva Tak Berwujud, 2010):

1. Kalau tujuannya adalah untuk mengukur dan melaporkan aktiva tidak berwujud secara keseluruhan dalam rangka penggabungan usaha, maka biasanya digunakan cara dengan menilai perusahaan secara keseluruhan dan kemudian mengurangi jumlah tersebut dengan nilai aktiva lain yang dapat diukur secara langsung. Cara seperti ini sifatnya subyektif, kecuali kalau nilai perusahaan dapat ditentukan secara obyektif di bursa saham.
2. Kalau tujuannya untuk melaporkan aktiva tertentu, maka pengukuran secara independen akan lebih bermanfaat.

**c. Perlakuan Akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Setiap akun yang ada di laporan keuangan perusahaan, baik yang ada di neraca maupun di laba/rugi pastinya memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda-beda mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan sampai dengan penyajian atau pelaporannya pada laporan tahunan. Sekurang-kurangnya ada 8 akun utama yang ada yaitu, pendapatan, beban, aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tak berwujud, aktiva lain-lain, kewajiban/hutang, dan modal. Pembahasan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini membuat pembahasan lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansi untuk beban dan aktiva tak berwujud.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) dilaksanakan di beberapa perusahaan dengan melaksanakan beberapa kegiatan atau program-program, di mana kegiatan tersebut menyangkut dan berkaitan dengan *financial* perusahaan. Seperti yang ada pada peraturan dan ketentuan peraturan akuntansi, bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan haruslah dilaporkan. Sampai saat ini pada laporan tahunan perusahaan, pelaporan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) hanya sebatas narasi dan anggaran biaya saja, tidak dijelaskan secara terperinci biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh perusahaan tersebut masuk diperlakukan sebagai beban atau sebagai aset sebagai aktiva tidak berwujud perusahaan.

Berikut ini perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai beban :

1. Pengakuan :

Melihat definisi beban pada Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (KDPP-LK) memungkinkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk diakui sebagai beban karena kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini mengeluarkan dana pada saat terjadinya transaksi atau kegiatan tersebut.

2. Pengukuran :

Pengakuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai beban, membuat akun *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini diukur seperti beban yang nantinya akan diukur besarnya dana yang dikeluarkan ketika terjadinya transaksi.

3. Pencatatan :

Pencatatan beban *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah dicatat dengan jurnal sebagai berikut :

Beban <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	xxx
Kas atau hutang perusahaan	xxx

#### 4. Penyajian dan Pelaporan :

Diakuinya *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai beban, membuat akun *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan disajikan atau dilaporkan pada laporan laba-rugi perusahaan.

Selain diperlakukan sebagai beban, berikut ini perlakuan akuntansi ketika *Corporate Social Responsibility* (CSR) diperlakukan sebagai aktiva tidak berwujud perusahaan :

##### 1. Pengakuan :

Jika dilihat dari segi manfaatnya, kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini tidak menghasilkan manfaat langsung yang bisa secara langsung dirasakan oleh perusahaan pada saat terjadinya transaksi kegiatan tersebut, melainkan manfaat jangka panjang yang berupa peningkatan nama baik perusahaan (*brand image*) yang tidak lain merupakan aktiva tidak berwujud.

##### 2. Pengukuran

Nama baik perusahaan merupakan aktiva tidak berwujud dimana pengukurannya harus dilakukan amortisasi setiap akhir periodenya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) diperlakukan sebagai aktiva tidak berwujud perusahaan karena karakteristik *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang memberikan dampak masa depan dengan biaya yang dikeluarkan pada saat ini merupakan karakteristik yang ada di aktiva tidak berwujud di mana nantinya harus

ada amortisasi setiap akhir periodenya. Sedangkan amortisasi juga merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan setiap periodenya.

### 3. Pencatatan

Pencatatan ketika diakui sebagai aktiva tidak berwujud adalah pencatatan pada amortisasi aktiva tidak berwujud yang dilakukan pada setiap akhir periode dengan jurnal sebagai berikut :

Beban amortisasi aktiva tak berwujud	xxx
Aktiva tak berwujud	xxx

### 4. Penyajian dan Pelaporan

Ketika *Corporate Social Responsibility* (CSR) diakui dan sebagai aktiva tak berwujud, maka nantinya *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan dicatat dan disajikan atau dilaporkan pada neraca perusahaan.

#### d. Standar Pelaporan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Beberapa di antara pemakai ini memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup dalam laporan keuangan. Namun demikian, banyak pemakai sangat tergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Laporan keuangan dengan tujuan khusus seperti prospektus, dan perhitungan yang dilakukan untuk

tujuan perpajakan tidak termasuk dalam di dalam laporan keuangan umum ini ((IAI), Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan, 2010).

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga ((IAI), Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan, 2010).

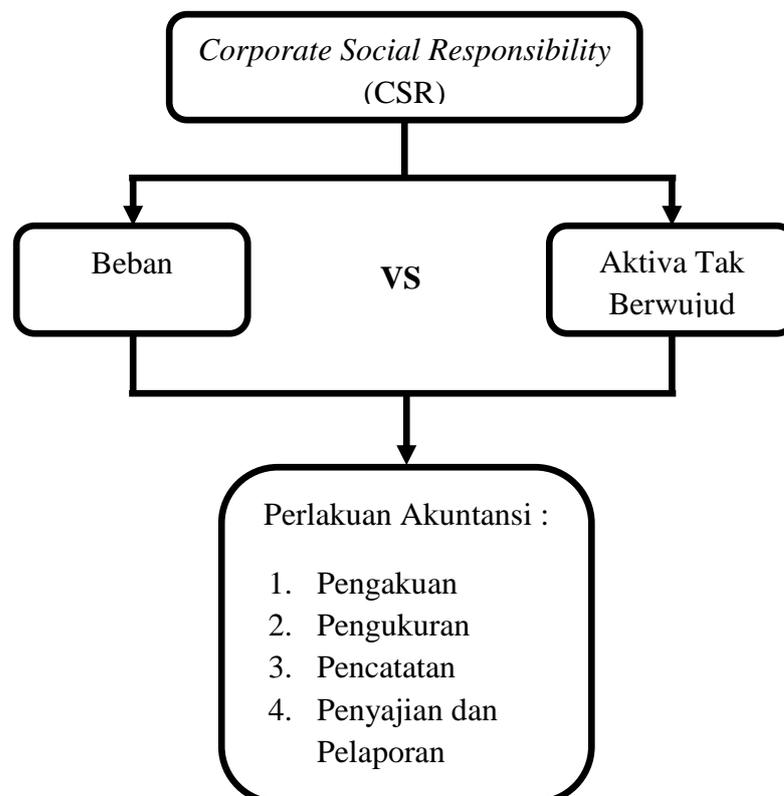
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan demikian, tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. Berhubung para investor merupakan penanam modal berisiko ke perusahaan, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai lain ((IAI), Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan, 2010).

Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian

dan pengambilan keputusan. Manajemen memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk dan isi informasi tambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun demikian, pelaporan informasi semacam itu berada di luar ruang lingkup kerangka dasar ini. Bagaimanapun juga, laporan keuangan yang diterbitkan didasarkan pada informasi yang digunakan manajemen tentang posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan ((IAI), Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan, 2010).

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran



*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar yang nantinya akan berdampak pada keberlanjutan hidup (*going concern*) suatu perusahaan. Tanggung jawab tersebut berupa program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk melakukan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Kegiatan yang banyak dilakukan oleh perusahaan seperti kegiatan pemberian sumbangan ke korban bencana, pemberian beasiswa pendidikan untuk siswa kurang mampu, pembangunan fasilitas umum, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Terlaksananya satu kegiatan tersebut tentunya tidak luput dari masalah pendanaan atau *financial* perusahaan karena setiap pelaksanaan kegiatan pastinya memerlukan dana yang nantinya akan disalurkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti yang diketahui bahwa setiap kegiatan yang melibatkan baik arus kas masuk maupun arus kas keluar, wajib dicatat dalam laporan tahunan perusahaan sebagai bentuk transparansi perusahaan terhadap para investor dan masyarakat serta pemerintah. Hal ini tentu saja mudah dilakukan apabila kegiatan yang dilakukan menyangkut kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan hanya memperlakukan setiap dana yang dikeluarkan sebagai beban perusahaan yang akan dicatat pada laporan laba-rugi perusahaan. Namun, hal ini berbeda dengan perlakuan akuntansi yang akan diterapkan ke jenis kegiatan sosial seperti kegiatan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pada kegiatan-kegiatan sosial seperti itu, tidak bisa serta merta biaya yang dikeluarkan langsung diakui sebagai biaya. Melihat dari pengertian biaya pada Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (KDPP-LK) memang perlakuan akuntansi pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) diperlakukan sebagai beban perusahaan karena dana yang dikeluarkan tersebut pada saat terjadinya kegiatan tersebut. Perlakuan akuntansi yang dimaksud adalah mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian atau pelaporannya. Namun, yang menjadi permasalahan adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya membuat perusahaan mengeluarkan dana terus menerus tanpa menghasilkan manfaat.

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada akhirnya juga akan menghasilkan manfaat yang besar untuk perusahaan yaitu nama baik perusahaan yang baik dimata investor, masyarakat, dan pemerintah sehingga *going concern* perusahaan tetap terjaga. Melihat dari sisi manfaat jangka panjang yang akan diberikan oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) membuat *Corporate Social Responsibility* (CSR) bisa juga diperlakukan sebagai aset atau aktiva perusahaan dalam kelompok aktiva tak berwujud. Hal ini didukung dengan pengertian aktiva tak berwujud pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 19.